

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa reformasi ini kita menginginkan agar demokrasi semakin dikembangkan di negara Indonesia. Untuk mengembangkan demokrasi perlulah masyarakat yang hidup berdemokrasi. Proses pembelajaran berdemokrasi itu akan lancar dan terarah bila dimulai sejak masa kanak-kanak selama disekolah. Itulah sebabnya pendidikan tentang demokrasi perlu ditanamkan dan dilatihkan dalam pendidikan sekolah di Indonesia ini. Maka sangat baik bila ditaman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, siswa dibantu untuk mendalami, memahami, melatih dan menghayati hidup berdemokrasi.

Demokrasi merupakan sistem politik dan cara pengaturan kehidupan terbaik bagi setiap masyarakat yang menyebut dirinya modern. Didalam praktek kehidupan sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini, ternyata paham demokrasi perwalian yang dijalankan di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwalian yang saling berbeda satu dengan yang lainnya.

Di Indonesia ternyata bahwa masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana, dalam masyarakat yang beraneka-ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi disamping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Maka tak mengherankan apabila demokrasi

menjadi salah satu ukuran terpenting didalam tata hubungan dan pergaulan yang semakin saling tergantung dewasa ini. Demokrasi jangan hanya dilihat dari segi bentuknya saja. Juga semangat anggota-anggotanya, maksudnya setiap anggota merasakan bahwa demokrasi itu diselenggarakan untuk para anggotanya sehingga merumuskan pengertian demokrasi sebagai bentuk pemerintah dari suatu kolektifitas yang memerintah diri sendiri, dalam hal ini sebagian anggota ambil bagian baik langsung ataupun tidak langsung dimana terjamin kebebasan persamaan.

Suatu gejala demokrasi ialah partisipasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan. Partisipasi yang dimaksud sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dalam defenisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi.

Sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipati yang disusun oleh *Department for International Development (DFID)*

Cakupan : Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.

- Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*): Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- Transparansi :Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*) : Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*) : Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*Sharing Power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- Pemberdayaan (*Empowerment*) : Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- Kerjasama : Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan

yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

Pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia diharapkan akan dapat membantu siswa menjadi warga Negara yang memiliki komitmen dan konsistensi terhadap pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Siswa diharapkan dapat melaksanakan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia sesuai dengan hakikat dan prinsip demokrasi yang berlaku. Siswa kelas XI merupakan siswa yang banyak terlibat dalam kegiatan organisasi dilingkungan sekolah dibandingkan siswa kelas X atau kelas XII. Berdasarkan pengamatan di lapangan, siswa dapat mengimplementasikan sistem demokrasi yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah, seperti ketika siswa melakukan pemilihan ketua OSIS. Banyaknya aktifitas yang dilakukan Siswa di atas mencerminkan pelaksanaan demokrasi memungkinkan siswa telah memahami tentang sistem demokrasi di Indonesia. namun berdasarkan observasi dilapangan bahwa tidak semua siswa memahami konsep demokrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemahaman siswa tentang demokrasi menarik untuk diteliti sehingga diharapkan dengan mempelajari materi tentang sistem demokrasi, siswa dapat membekali untuk lebih memahami konsep demokrasi, menjadi warga Negara yang menjalankan sistem demokrasi Indonesia tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi menjadi warga Negara yang dapat menjunjung tinggi prinsip demokrasi sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sekolah mempunyai tugas tidak hanya terbatas pada masalah pengetahuan dan diinformasi saja, akan tetapi mencakup tanggung jawab pendidikan secara luas. Demikian juga pada guru, tugas tidak hanya mengajar, tetapi berperan sebagai pendidik yang menjadi pembentuk masa depan. Ia adalah langkah pertama dalam pembentukan kehidupan yang menurut individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Pendidikan modern menuntun guru atau pendidik untuk mengamati perkembangan individu dan mampu menyusun sistem pendidikan sesuai dengan perkembangan tersebut. Dalam pengertian ini berarti proses pendidikan merupakan penciptaan penyesuaian antara individu dengan nilai-nilai demokrasi yang harus oleh lingkungan menurut kepentingan perkembangan baik secara social, spiritual dan individu. Keberhasilan proses ini bergantung pada cara kerja dan metode yang digunakan oleh pendidik dalam penyesuaian tersebut. Jadi disini peran guru sangat penting dalam pembentukan kemampuan penyesuaian diri individu.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pemahaman demokrasi siswa dan apakah ada hubungannya antara pemahaman demokrasi demokrasi dengan partisipasi siswa di OSIS khususnya di SMA Negeri 39 Jakarta Timur.

Penemuan peneliti menemukan bahwa pemahaman siswa tentang materi demokrasi sudah cukup baik. Hal ini ditandai dengan hasil memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimum (KKN), akan tetapi kenyataan dilapangan yang ditemukan peneliti yaitu bahwa partisipasi siswa di OSIS cenderung kurang, hal ini ditandai dengan ketidak hadiran rapat OSIS, ketika rapat OSIS itu sendiri terhadap masalah-masalah yang terjadi di OSIS serta siswa tersebut kurang kreatif ketika mengusulkan tentang program kerja yang akan dilaksanakan untuk kegiatan di SMAN 39 kemudian, untuk alasan selanjutnya yaitu ketika terjadi perbedaan pendapat pada rapat OSIS sudah siswa tidak biasa menghargai pendapat antara teman satu dengan teman yang lainnya selain itu ketika hasil rapat sudah selesai diantara siswa tidak biasa menerima hasil keputusan rapat OSIS itu sendiri. Dan juga kurangnya kordinasi antara kepala bidang tiap seksi di OSIS dengan anggotanya masing-masing. Dan kurangnya kecerdasan sosial siswa dalam menanggapi setiap masalah misalkan ketika teman lain ada masalah di OSIS merek tidak tanggap terhadap permasalahan itu sehingga ada beberapa siswa yang mudur tanpa berita sehingga salah satu program kerja tidak terlaksana.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Sejauh mana pemahaman mengenai masalah demokrasi dengan partisipasi siswa di OSIS?
- b. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan demokrasi?
- c. Apakah terdapat hubungan antara tingkat pemahaman akan materi demokrasi dengan partisipasi siswa di OSIS?
- d. Adakah hasil partisipasi siswa di OSIS setelah menerima materi-materi demokrasi?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian akan membatasi pada masalah pemahaman siswa tentang demokrasi. Pemahaman dalam hal ini menurut Suharsimi Arikunto yaitu seorang yang sedang belajar agar dapat memberikan contoh, menyimpulkan, membedakan, dan menerangkan tentang sesuatu, dengan partisipasi siswa di OSIS kelas XI yaitu kemampuan siswa berhubungan mampu respon terhadap demokrasi yang ada dilingkungan sekolah

baik dengan teman, guru dan peraturan-peraturan yang ada dilingkungan sekitarnya di SMA Negeri 39 Jakarta Timur.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka perumusan masalah yang diajukan adalah:

“Apakah terdapat hubungan antara pemahaman tentang demokrasi dengan partisipasi siswa di OSIS di SMA Negeri 39 Jakarta Timur”

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

- a. Masyarakat, agar lebih mengerti dan memahami betapa pentingnya dan bermanfaatnya demokrasi bagi siswa.
- b. Siswa, agar dapat berpartisipasi dalam berdemokrasi kepada siapapun di dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Pemerintah, agar lebih giat mengadakan pengarahan dan bimbingan kepada siswa tentang pentingnya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

- d. Bidang penelitian, agar dapat menambah khasanah tentang pemahaman demokrasi dan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya dalam rangka penelitian berpartisipasi siswa di OSIS.